

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah Desa Simpang

Desa Simpang merupakan salah satu desa yang berada di kawasan pegunungan Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Kabupaten Seluma sendiri merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan yang resmi terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, dengan ibu kota berada di Pasar Tais.⁶⁶ Secara umum, karakteristik Kabupaten Seluma didominasi oleh wilayah agraris dan pesisir, dengan penduduk yang tersebar di berbagai kecamatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduknya mencapai 207.877 jiwa pada tahun 2021 dan diperkirakan meningkat menjadi 215.354 jiwa pada pertengahan tahun 2024.⁶⁷ Kondisi

66 Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seluma, Lembaran Negara RI Tahun 2003.

67 Badan Pusat Statistik Kabupaten Seluma, Kabupaten Seluma Dalam Angka 2024 (Seluma: BPS Kabupaten Seluma, 2024).

geografis dan sosial Kabupaten Seluma tersebut turut memengaruhi dinamika pembangunan di desa-desa, termasuk Desa Simpang. Secara topografis, Desa Simpang berada pada wilayah perbukitan yang dikelilingi oleh hamparan hutan, lahan pertanian, dan perkebunan milik masyarakat. Karakter wilayah yang bergelombang dan terpencil menjadikan desa ini memiliki suasana pedesaan yang cukup tradisional, namun sekaligus menghadirkan tantangan tersendiri dalam hal aksesibilitas. Jalan-jalan utama menuju Desa Simpang sebagian besar berada pada jalur menanjak, berbatu, serta rentan rusak terutama ketika musim hujan.⁶⁸ Letaknya yang berada di daerah pegunungan juga menjadikan desa ini sebagai wilayah agraris yang bergantung pada hasil kebun seperti kopi, pinang, karet, dan berbagai jenis tanaman pangan lainnya. Aktivitas ekonomi masyarakat yang tersebar antara permukiman dan kebun membuat konektivitas antarwilayah di desa ini menjadi kebutuhan yang sangat penting.

68 Badan Pusat Statistik Kabupaten Seluma, Kecamatan Seluma Utara Dalam Angka 2025 (Seluma: BPS Kabupaten Seluma, 2025).

Secara geografis dan administratif, Desa Simpang memiliki batas wilayah yang jelas dengan desa-desa sekitarnya. Di sebelah utara, Desa Simpang berbatasan dengan Desa Talang Empat atau Talang Beringin. Wilayah ini menjadi jalur alternatif masyarakat untuk menuju daerah yang lebih rendah dan pusat kecamatan. Di bagian timur, Desa Simpang berbatasan dengan Desa Puguk atau Sinar Pagi, sebuah kawasan yang juga memiliki karakteristik perbukitan dengan aktivitas pertanian yang hampir serupa. Pada sisi selatan, desa ini berbatasan dengan Desa Pandan atau Sekalak, yang umumnya menjadi akses masyarakat menuju beberapa fasilitas umum di kecamatan. Sementara itu, di sisi barat, Desa Simpang berbatasan dengan Desa Selisingan atau Lubuk Resam,⁶⁹ yang sering menjadi rute penghubung masyarakat ketika membawa hasil kebun menuju pasar kecamatan.

Letak geografis Desa Simpang yang dikelilingi oleh desa-desa lain dengan karakter serupa menjadikan desa ini

69 Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seluma.

berada pada satu kluster wilayah yang sangat mengandalkan akses darat sebagai penghubung utama. Hal ini menyebabkan infrastruktur seperti jalan dan jembatan memegang peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat, baik dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan pemerintahan. Dalam konteks pembangunan daerah, kondisi geografis semacam ini menuntut perhatian khusus dari pemerintah daerah agar keterjangkauan masyarakat Desa Simpang terhadap layanan dasar dapat terpenuhi secara optimal.

B. Kondisi Demografi dan Sosial Masyarakat Desa Simpang

Masyarakat Desa Simpang didominasi oleh Suku Serawai dan memeluk Agama Islam. Populasi desa saat ini terdiri dari 169 Kepala Keluarga (KK), dengan total penduduk yang terdiri dari 299 jiwa laki-laki dan 260 jiwa perempuan (Data Desa Simpang, Tahun Terbaru).⁷⁰ Populasi Desa Simpang didominasi oleh masyarakat usia produktif dengan tingkat mobilitas tinggi, di mana mata pencaharian utama

⁷⁰ Pemerintah Desa Simpang, Data Kependudukan Desa Simpang.

masyarakat secara mayoritas (di atas 85%) adalah petani dan pekebun.⁷¹

Karakteristik demografi dan ekonomi ini menciptakan ketergantungan ekstrem pada infrastruktur transportasi yang memadai untuk mengangkut hasil panen harian. Ketergantungan ini diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar akses menuju layanan publik esensial, seperti Puskesmas, sekolah lanjutan (SMP/SMA), dan kantor kecamatan, mengharuskan mereka melintasi sungai. Kondisi ketiadaan jembatan yang aman secara serius menghambat akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sehingga masalah ini diklasifikasikan sebagai pemenuhan *Maslahah Dharuriyyah* (kebutuhan primer yang menyangkut keselamatan jiwa, akal, dan harta) dari perspektif Fiqh Siyasah .

Menanggapi masalah ini, masyarakat Desa Simpang menunjukkan pola partisipasi aktif, di mana permintaan pembangunan jembatan ini telah berulang kali dimasukkan

71 Pemerintah Desa Simpang, Profil Desa Simpang (Seluma Utara: Pemerintah Desa Simpang, Tahun Terbaru).

sebagai usulan prioritas melalui jalur resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang kemudian diajukan ke tingkat Kecamatan hingga Kabupaten, menyoroti perlunya respons yang lebih efektif dari Pemerintah Kabupaten⁷².

C. Kondisi Ekonomi Desa Simpang

Kecamatan Seluma Utara merupakan salah satu wilayah strategis di Kabupaten Seluma yang dikenal sebagai lumbung perkebunan. Perekonomian masyarakat di daerah ini sangat bergantung pada sektor pertanian, khususnya perkebunan karet dan kelapa sawit, yang menjadi sumber pendapatan utama warga. Infrastruktur transportasi, termasuk jalan dan jembatan, memegang peranan vital dalam mendukung kelancaran distribusi hasil produksi. Tanpa infrastruktur yang memadai, aktivitas ekonomi di wilayah ini akan terhambat, sehingga produktivitas dan kesejahteraan masyarakat berisiko menurun.

72 Pauzi Asri, Antonio Imanda, dan Evi Lorita, "Analisis Perencanaan Kebijakan Pembangunan Seribu Jalan Mulus Kabupaten Seluma Tahun 2021," *PROFESSIONAL: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik* (2023): 2

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Seluma tahun 2015, luas lahan perkebunan karet di Kecamatan Seluma Utara mencapai 1.004 hektar, sedangkan kelapa sawit seluas 814 hektar. Total luas lahan primer di wilayah ini mencapai sekitar 1.818 hektar.⁷³ Skala produksi yang cukup besar ini menegaskan pentingnya sistem transportasi yang handal untuk mendukung distribusi hasil perkebunan. Ketiadaan jembatan yang kokoh dan jalan yang layak dapat menimbulkan hambatan logistik yang signifikan, mengakibatkan biaya angkut meningkat dan kualitas hasil panen menurun. Kondisi ini secara langsung memengaruhi margin keuntungan petani dan menimbulkan kerugian ekonomi kolektif (*mafsadah*) yang tidak bisa diabaikan.⁷⁴

Dominasi komoditas karet dan kelapa sawit juga memiliki implikasi strategis bagi ekonomi lokal. Pertama, ketidakmampuan infrastruktur untuk mendukung distribusi secara efisien menyebabkan kenaikan biaya logistik (*high cost*

⁷³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Seluma, *Seluma Dalam Angka 2015* (Bengkulu: BPS Kabupaten Seluma, 2015), h. 45-46.

⁷⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Siyasah Al-Shar'iyah* (Kairo: Dar Al-Fikr, 1990), h. 45-48.

economy). Biaya transportasi yang tinggi tidak hanya mengurangi pendapatan petani, tetapi juga menurunkan daya saing produk perkebunan di pasar.⁷⁵ Kedua, penurunan produktivitas dan keuntungan petani akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat secara keseluruhan. Penurunan daya beli ini berimplikasi pada melemahnya aktivitas ekonomi lokal, termasuk konsumsi, investasi kecil, dan pengembangan usaha mikro di desa. Dampak lebih luasnya adalah potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sektor pertanian, sehingga mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.⁷⁶

Selain itu, kondisi infrastruktur yang tidak memadai juga menimbulkan risiko sosial. Terputusnya akses antar desa atau kesulitan mobilitas dapat menghambat layanan kesehatan, pendidikan, dan kegiatan sosial masyarakat.

75 Evy Sriwati, Budi Setiawati, dan Nurbiah Tahir, “Peran Pemerintahan Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur,” *Jurnal Kimap* Volume 5, Nomor 1 (Februari 2024).

76 Laurencia G. Ajawaila, Welson Y. Rompas, dan Femmy M. G. Tulisan, “Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara,” *JAP* No. 104 Vol. VII (2021).

Misalnya, petani yang kesulitan mengangkut hasil panen ke pasar dapat kehilangan waktu dan biaya transportasi tambahan, sementara siswa dan tenaga kesehatan juga menghadapi kesulitan akses ke fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan. Dengan demikian, pembangunan jalan dan jembatan yang kokoh bukan hanya menjadi kebutuhan ekonomi, tetapi juga menjadi kebutuhan sosial yang mendesak bagi masyarakat Kecamatan Seluma Utara.

Secara keseluruhan, kondisi Kecamatan Seluma Utara menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi berperan sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Ketersediaan jalan dan jembatan yang layak menjadi syarat utama agar kegiatan ekonomi, terutama di sektor perkebunan, dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah ini tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik atau teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan

kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.⁷⁷ Dengan adanya infrastruktur yang memadai, distribusi hasil perkebunan akan lebih lancar, biaya logistik lebih rendah, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga secara berkelanjutan.

D. Kondisi Infrastruktur Desa Simpang

Desa Simpang merupakan salah satu desa tua yang tumbuh secara alami dari kelompok-kelompok pemukiman masyarakat adat Serawai yang sejak lama mendiami kawasan perbukitan Seluma Utara. Pembentukan Desa Simpang tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses sosial yang panjang, berawal dari perpindahan dan menetapnya masyarakat di wilayah tersebut. Pada mulanya, kawasan yang kini dikenal sebagai Desa Simpang hanyalah berupa kebun dan ladang yang dimanfaatkan warga dari desa-desa sekitar, seperti Talang Empat, Lubuk Resam, dan Sekalak, untuk bercocok tanam.⁷⁸

⁷⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Seluma, Kecamatan Seluma Utara Dalam Angka 2025, Seluma: BPS Kabupaten Seluma, 2025.

⁷⁸ Pemerintah Kabupaten Seluma, Dokumen Penetapan Desa Simpang.

Kegiatan pertanian yang semakin intens serta kebutuhan masyarakat untuk membuka lahan baru menyebabkan wilayah tersebut perlahan berkembang menjadi sebuah pusat permukiman. Seiring meningkatnya jumlah penduduk yang menetap, muncul kebutuhan untuk membentuk satu kesatuan administrasi yang lebih teratur. Pemerintah daerah merespons dinamika tersebut dengan melakukan penataan wilayah hingga akhirnya menetapkan Desa Simpang sebagai desa definitif. Penetapan ini didorong oleh dua faktor utama: pertama, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang membutuhkan struktur pemerintahan yang jelas; dan kedua, kebutuhan masyarakat akan kepastian administrasi kependudukan serta pelayanan publik yang merata.

Nama “Simpang” sendiri memiliki makna geografis dan historis, merujuk pada posisi desa yang berada di titik pertemuan beberapa jalur penghubung antarwilayah di Seluma Utara. Pada masa awal, jalur-jalur pegunungan yang mengarah ke Puguk, Pandan, Talang Beringin, Lubuk Resam,

dan Sekalak bertemu di satu kawasan yang kini menjadi pusat desa. Letak strategis inilah yang kemudian membentuk identitas Desa Simpang hingga sekarang. Perkembangan desa semakin terlihat setelah Kabupaten Seluma ditetapkan sebagai daerah otonom pada tahun 2003.⁷⁹

Otonomi daerah membuka peluang bagi desa untuk memperoleh porsi pembangunan yang lebih besar. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), masyarakat Desa Simpang mulai aktif mengusulkan pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, dan fasilitas dasar lainnya. Meski demikian, kondisi geografis yang menantang serta keterbatasan anggaran daerah membuat pembangunan berlangsung secara bertahap.⁸⁰

Hingga kini, Desa Simpang tetap mempertahankan karakter pedesaan yang lekat dengan budaya Serawai dan kehidupan sosial yang komunal. Mayoritas masyarakat

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seluma.

⁸⁰ Pemerintah Desa Simpang, Berita Acara Musrenbangdes, 2023–2024.

menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, dan hasil hutan. Pembangunan desa masih terus berjalan, didorong oleh kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang memadai dan komitmen pemerintah desa untuk membawa wilayah ini menuju kondisi yang lebih baik.

Secara administratif, Desa Simpang dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta lembaga kemasyarakatan lainnya.⁸¹ Pemerintah desa menjalankan fungsi di tiga bidang utama, yaitu pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan desa meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan rencana pembangunan, hingga penyediaan pelayanan dasar bagi warga. Meskipun demikian, kondisi infrastruktur di Desa Simpang masih tergolong terbatas dan memerlukan perhatian serius.⁸²

Letak desa yang berada di perbukitan dan jauh dari pusat kecamatan sangat memengaruhi kualitas sarana dan

81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

82 Pemerintah Desa Simpang, Laporan Kondisi Infrastruktur Desa Simpang, 2024.

prasarana dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, serta akses layanan kesehatan.⁸³Salah satu masalah paling mendesak adalah kerusakan jembatan utama yang menghubungkan pusat permukiman dengan lahan pertanian serta permukiman warga di seberang sungai. Jembatan tersebut telah lama tidak berfungsi karena kerusakan berat, sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan menimbulkan risiko keselamatan, terutama pada musim hujan. Kerusakan jembatan ini telah berulang kali diusulkan dalam Musrenbang tingkat desa maupun kecamatan, namun belum terealisasi. Hal ini menjadi indikator adanya kesenjangan antara kebutuhan mendesak masyarakat dan respons pemerintah kabupaten. Ketiadaan jembatan yang layak tidak hanya menghambat distribusi hasil pertanian, tetapi juga mengganggu akses pendidikan dan layanan kesehatan.

83 Cahyo Sasmito Mustafa, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa," JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6, No. 3 (2017): 72–75.

Selain jembatan, kondisi jalan desa juga menjadi tantangan besar. Jalan penghubung antar dusun sebagian besar masih berupa jalan tanah yang mudah rusak dan licin saat musim hujan, membuat transportasi menjadi tidak stabil. Dampaknya sangat terasa bagi petani yang perlu membawa hasil kebun ke pasar kecamatan, serta bagi anak-anak yang harus menempuh perjalanan jauh menuju fasilitas pendidikan. Dalam aspek fasilitas umum lainnya, sekolah dasar memang telah tersedia di desa, namun pendidikan lanjutan seperti SMP dan SMA berada cukup jauh.

Demikian pula fasilitas kesehatan, di mana masyarakat hanya bergantung pada posyandu atau puskesmas pembantu yang tidak selalu memiliki tenaga medis lengkap. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, warga harus pergi ke pusat kecamatan atau kabupaten. Melalui Musrenbangdes, pemerintah desa terus mengusulkan prioritas pembangunan seperti perbaikan jalan, pembangunan jembatan, peningkatan fasilitas umum, serta program

pemberdayaan masyarakat.⁸⁴ Namun, keterbatasan anggaran kabupaten serta luasnya kebutuhan pembangunan di wilayah lain sering kali membuat realisasi di Desa Simpang berjalan lambat.

Karena itu, sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten menjadi kunci penting agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara efektif. Dalam menjalankan pemerintahan, Desa Simpang tetap mengedepankan prinsip partisipatif dan transparansi anggaran. Pemerintah desa memastikan informasi pembangunan dapat diakses melalui musyawarah warga dan penyampaian APBDes kepada masyarakat. Nilai-nilai adat dan agama juga memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan antara pemerintah desa dan masyarakat.⁸⁵

E. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Simpang

- 1) Kepala Desa : Rezon Efendi
- 2) Sekretaris Desa : Wawan Bahtiar

⁸⁴ Pemerintah Desa Simpang, Berita Acara Musrenbangdes, 2023–2024.

⁸⁵ Pemerintah Desa Simpang, Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Simpang, 2024.

3) Kepala Urusan (KAUR):

a. KAUR Keuangan : Darmawan

4) Kepala Seksi (KASI):

a. KASI Pemerintahan : Listananto

5) Kepala Dusun (KADUS):

a. KADUS : Dedy likuanto

6) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Ketua BPD : Abduradi Ardan

b. Wakil Ketua BPD : Sutrisno

c. Sekretaris BPD : Muksan Johari

d. Anggota BPD : Sukanto⁸⁶



⁸⁶ Pemerintah Desa Simpang, Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Simpang, 2024.